

Revitalisasi Potensi Lingkungan- Ekonomi-Sosial Budaya Dalam Mewujudkan "*Sustainable Water Front City*" di Kota Cirebon

Oleh:

Prof. Dr. Ir. H. Hadi Susilo Arifin, M.S. Dipl.RLE

Pendahuluan

Dalam era teknologi informasi yang menembus berbagai batas ruang dan waktu, seolah-olah kita dihadapkan pada permasalahan menghadapi persaingan yang bebas dan bersifat global. Menghadapi persaingan ini, siapa pun harus mengetahui dan bisa mengevaluasi dirinya sendiri, termasuk memahami dengan sadar akan segala kekurangan maupun kelebihan. Hal ini merupakan modal besar bagi kota Cirebon, jika kita bisa mengeliminir segala kekurangan yang ada dengan cara memberdayakan kembali (*revitalization*) apa yang kita miliki sebagai kelebihan kota Cirebon yang tidak dimiliki kota-kota lainnya, atau paling tidak yang menjadi karakter kota Cirebon yang sangat "*distinct*" dibandingkan dengan kota lain di sekitarnya baik dalam secara lokal, nasional, regional, atau bahkan internasional.

Kata kunci "*revitalisasi*" digunakan dalam makalah ini, semata-mata ingin mengingatkan kita, kota Cirebon bahwa telah memiliki semuanya, yaitu sumberdaya lingkungan (bio-fisik), ekonomi dan sosial budaya dengan karakter sebuah kota pantai, laju perekonomiannya pesat dan terbuka dengan daya aksesibilitas yang tinggi karena sebagai kota pelabuhan, dan memiliki sejarah yang panjang sebagai komunitas yang berkarakter. Terbukti masih bisa dilihat berbagai artefak serta pusat-pusat kesultanan seperti Kasepuhan, Kanoman, Kacerbonan, Kaprabonan dengan berbagai artefak kehidupan sosial dan budaya yang dimiliki oleh segenap masyarakat kota Cirebon yang menyebabkan kita bangga telah dilahirkan sebagai "Wong Cerbon". Saya pribadi tidak pernah minder ketika sering mendengar komentar saat memperkenalkan diri sebagai orang Cirebon yang disebut "Jaware, Sunda bukan,

Jawa bukan". Justru komentar tersebut adalah modal kita bahwa Cirebon memang beda. Ini bisa dibuktikan dengan keragaman jenis kesenian, budaya masyarakat, adat istiadat, logat bahasa, kuliner, arsitektur, hingga karakter lingkungan. Sebagai wong Cerbon, kita tidak akan kehabisan bahan untuk mempromosikan Cirebon mulai dari obyek wisata yang khas yaitu keraton-keraton yang ada, Gua Sunyaragi, Astana Gunung Jati; makanannya (empal gentong, nasi jambang, nasi lengko, tahu gejrot, krupuk udang, sirup campolai hingga makanan *seafood* sampai terasi); keseniannya (topeng Cerbon, tarling, sintren, lais, dongbret dan lain sebagainya); batik Trusmi, arsitektur gapura Cerbon (candi bentar dari batu bata merah), mangga gedong, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaannya, siapa yang berkewajiban mengusung dan mengawal segala potensi tersebut akan tetap berkelanjutan? Tidak hanya semata menanamkan kebanggaan pada diri kita dan generasi mendatang, tapi seharusnya memberdayakannya untuk keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya kota Cirebon. Dengan karakteristik lingkungan yang ada, Cirebon sangat potensial untuk mengklaim sebagai kota "*water front city*". Untuk itu beberapa konsep serta kajian komparatif dengan kota lainnya yang lebih dulu berkembang, akan disampaikan pada makalah ini.

Harmonisasi Pengembangan Kota Cirebon pada Sektor Pertanian dengan Wilayah Sekitarnya

Setelah sekitar satu dekade memasuki milenium baru, konsep modernisasi dan globalisasi merupakan isu yang harus dan tetap perlu direspon oleh semua sektor, tidak terkecuali oleh sektor ekonomi (industri, perdagangan, pertanian, pertambangan) dan sektor jasa lainnya. Hal ini terkait dengan tata-ruang kota. Sudah jelas penataan ruang (*spatial*) yang sesuai dengan penggunaannya sudah harus diterapkan melalui kajian evaluasi lahan dan kesesuaian lahan. Dalam hal ini sejak beberapa dekade lalu Pemerintah sesungguhnya telah menyusun strategi pengaturan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Permasalahannya, apakah rencana yang tertuang dalam bentuk peta rencana penggunaan lahan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh setiap wilayah dan setiap kota. Bahkan kota Cirebon pun tidak bisa berdiri sendiri. Untuk

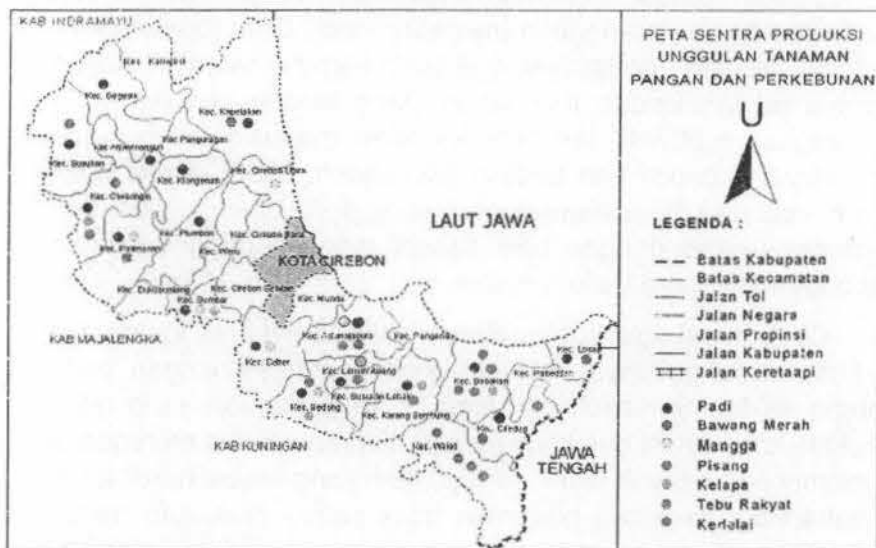
perencanaan yang baik dengan memperhatikan batas administratif, batas ekologis dan batas budaya maka kota Cirebon tidak bisa tidak harus berkordinasi dengan wilayah pinggirannya, urban *fringe/country side* yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Cirebon, kabupaten Kuningan, kabupaten Indramayu, hingga kabupaten Majalengka.

Perencanaan tata ruang sesungguhnya adalah merencanakan zonasi area atau lingkungan hidup manusia dari skala lingkungan ketetanggaan (*neighborhood*), desa (*community*), kota (*city*), wilayah (*regional*) hingga skala negara (*national*). Kajian dasarnya adalah kaidah fisik lahan-ruang kaidah perilaku yang menerangkan motivasi dan pola kegiatan manusia ditinjau dari aspek sosial-ekonomi dan budaya (Soegijoko, 1985). Pada skala wilayah, kota dan desa, harmonisasi ruang perlu direncanakan dan diimplementasikan dengan baik sesuai rencana pengembangan pembangunan secara berkelanjutan.

Cirebon sebagai suatu wilayah yang terdiri atas kabupaten dan kota, sesungguhnya memiliki potensi pengembangan pada berbagai sektor, termasuk pertanian. Dari pemetaan yang telah dilakukan, konsistensi dan komitmen pemerintah dalam merencana dan merancang wilayah untuk penggunaan yang sesuai harus tetap dipertahankan. Kegiatan pertanian tidak selalu dilakukan hanya di wilayah perdesaan, pada beberapa komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sifat yang rentan dalam pengangkutan seharusnya bisa dikembangkan di wilayah perkotaan sebagai aktivitas *urban agriculture*. Pengembangan wilayah juga dapat berbasis pada sektor pertanian dengan konsep agropolitan. Pengembangan pertanian secara *on farm* dan *off farm* (hulu hingga ke hilir) mulai produksi, hingga penanganan pasca panen, kegiatan agribisnis dan agroindustri, tentu dengan tidak mengabaikan kajian daya dukung area (Arifin, 2006).

Kota Cirebon didukung oleh wilayah sekitarnya untuk kebutuhan pangan (Gambar 14). Sebagai wilayah perkotaan, dengan kondisi lingkungan yang mendukungnya, kota Cirebon dapat mengusung pertanian perkotaan (*urban agriculture*) dengan pola intensif di pekarangan, antara lain revitalisasi komoditas unggulan '**pelem gedong**'. Sebagai sentra produksi mangga, maka mangga gedong dapat menjadi primadona produksi pertanian kota. Usaha yang dilakukan adalah revitalisasi pekarangan untuk mangga

gedong, dan secara kelembagaan membangkitkan koperasi mangga. Untuk etalase, pemerintah kota dapat bekerjasama dengan Yayasan Sunyaragi untuk memanfaatkan ex: PUJAGALANA (Pusat Jajanan Segala Ana) di kawasan Sunyaragi sebagai pusat agrowisata mangga gedong. Luas sekitar 5 ha dengan aksesibilitas yang memadai dapat dijadikan pusat perekonomian dan wisata pertanian. Perencanaan dan perancangan yang ekologis diharapkan dapat mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.



Gambar 14. Peta sentra produksi unggulan tanaman pangan dan perkebunan di wilayah sekitar Kota Cirebon.

Pengembangan Pertanian Perkotaan di Era Modern

Perkembangan dunia sedang mengalami proses transformasi. Ini merupakan tantangan bagi pengambil dan pembuat kebijakan, baik Pemerintah maupun seluruh stakeholders di tingkat lokal, regional maupun global. Pola pengembangan pertanian selanjutnya mengacu pada kecenderungan pasar serta keseimbangan *supply* dan *demand*. Rancangan dan rencana kesesuaian penggunaan lahan, penggunaan teknologi produksi yang tepat guna, kehandalan sumberdaya petani, dukungan kebijakan pemerintah, semuanya harus mendukung persaingan

sehat di sektor pertanian. Pada era moderen serta globalisasi ini, teknologi komunikasi dan informasi maju dengan pesat. Pola interaksi ekonomi, teknologi, budaya dan pemerintahan (*governance*) telah dengan mudah melewati batas-batas Negara. Akibat globalisasi ini cakrawala dunia telah berubah dalam tiga hal utama (Soegijoko, 2002), yaitu: penciutan ruang (*shrinking space*), penciutan waktu (*shrinking time*), dan lenyapnya batas-batas antar Negara. Oleh karena itu industri pertanian bukan saatnya lagi semata-mata untuk kecukupan papan, sandang dan pangan, tetapi bagaimana kita harus bisa menahan arus impor yang berlebih, bahkan jika memungkinkan kita yang harus bisa mengeksport surplus produksi komoditas pertanian (Arifin, 2006).

Cirebon dengan segala variasi potensi sumberdaya alamnya, di era moderen ini pemerintah dan semua stakeholders hendaknya tetap memberi perhatian tinggi terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beberapa skenario agar pertanian tetap eksis, antara lain adalah pengembangan pertanian perkotaan dan konsep pengembangan wilayah sebagai agropolitan.

Pertanian Perkotaan (*Urban Agriculture*)

Jumlah penduduk perkotaan dalam beberapa dekade mengalami pertambahan yang sangat cepat. Tahun 2004 prosentase penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 48,3%, kondisinya terus meningkat di mana pada tahun 1971 hanya sebesar 17,4% (Indrawati, 2005). Diperkirakan sebelum 2010, secara nasional jumlah penduduk perkotaan telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 proporsi penduduk perkotaan akan mencapai 68,3%.

Wilayah Cirebon yang terdiri atas Kabupaten dan Kota, perlu juga mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan wilayah di mana proses kotanisasi terus melaju. Pemusatan perkembangan penduduk menjadikan suatu wilayah perdesaan menjadi kota kecil dan seterusnya. Desa sebagai tulang-punggung pemasok produksi pertanian, semakin menurun perannya apabila luas lahan pertanian dari hari ke hari semakin berkurang. Oleh karena itu citra tentang kegiatan pertanian yang selalu berhubungan dengan perdesaan sedikit demi sedikit harus diubah. Wilayah kota, terutama ruang terbukanya sangat berpotensi

untuk dikembangkan sebagai lahan aktivitas pertanian. Berdasarkan pengalaman penulis, baik di Eropa maupun di Negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea, sebagian wilayah kota tetap memberi kontribusi produksi pertanian melalui kegiatan pertanian perkotaan, sebagaimana kota memenuhi peningkatan permintaan terhadap layanan publik, yaitu transportasi misal, air bersih dan sanitasi, energi, perumahan dan pekerjaan yang layak, serta lingkungan yang aman, bersih dan sehat.

Pada kegiatan pertanian perkotaan, area pertanian dapat dikembangkan pada ruang terbuka hijau kota baik yang berupa lahan pertanian, kebun campuran, bantaran sungai, jalur hijau jalan dan rel kereta api, area taman-taman dan pemakaman hingga ke pekarangan rumah. Pilihan komoditas umumnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik berupa produk pertanian tanaman (produk tanaman hortikultur, yaitu buah-buahan, sayuran dan tanaman hias), peternakan (produksi daging, telur maupun ternak hias) dan perikanan (produksi daging ikan maupun ikan hias). Pilihan teknologinya pada umumnya dari yang sederhana (pertanian organik) maupun yang moderen, yaitu hidroponik, aeroponik dan vertikultur. Untuk wilayah Cirebon, komoditas yang sangat potensial dikembangkan sebagai produk pertanian perkotaan antara lain adalah mangga dari setiap pekarangan. Selanjutnya penataan kelembagaannya untuk pasca panen seperti koperasi, industri pengemasan, transportasi dan perluasan pemasaran. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk komoditas lain-lainnya.

Pengembangan pertanian di kota Cirebon tidak terbatas untuk wilayah darat saja, tetapi juga di wilayah perairan. Oleh karena kajian daya dukung pertanian sudah seharusnya dipertimbangkan secara baik oleh pengambil keputusan untuk menentukan kesesuaian dan daya produksi, serta keberlanjutannya. Daya dukung ini tidak semata dipengarungi oleh fungsi-fungsi luas area saja, tetapi juga tingkat kesuburan (*suitability* dan *capability* lahan), tingkat teknologi yang digunakan, serta kemampuan sumberdaya manusianya. Secara eksternal, kebijakan pemerintah, penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penyalahgunaan penggunaan lahan, *incentive* dan *disincentive* pada pelaku pertanian, serta *land-rent* dan *land taxation* sangat berperan pada keberlanjutan pertanian di Cirebon dan kelestarian lingkungannya. Sebagai kota pantai, Cirebon sebaiknya memberdayakan sekuat-kuatnya untuk "tempat pelelangan ikan" secara moderen, bersih dan nyaman,

berkeadilan bagi para nelayan, promosi yang gencar sehingga bisa menjadi salah satu obyek wisata pertanian ikan di tengah kota. Untuk membudayakan diversifikasi pangan hewan ikan, Cirebon sudah selayaknya membangun pasar ikan dan jajanan makan laut yang berbasis pada masyarakat (bukan basis investor/pengembang yang berkapital dan monopoli), pada area khusus yang bisa menjadi alternatif rekreasi/wisata kuliner di ruang terbuka. Hal ini jika didesain dan dipromosikan secara baik, revitalisasi perikanan kota Cirebon dapat menjadi salah satu unggulan pengembangan pertanian.

Agropolitan

Basis pertanian yang kuat dapat menjadikan suatu wilayah berkembang sebagai agropolitan. Sektor pertanian dikembangkan mulaidarikegiatanbudidayanyahinggaagroindustri dan agribisnisnya (Arifin, 2006). Sistem Agribisnis adalah rangkaian kegiatan dari lima subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu subsistem faktor input pertanian (*input factor sub-system*), subsistem produksi pertanian (*production sub-system*), subsistem pengolahan hasil pertanian (*processing sub-system*), subsistem pemasaran (*marketing sub-system*), dan subsistem kelembagaan penunjang (*supporting institution sub-system*). Kegiatan pertanian/budidaya adalah kelompok kegiatan usahatani (*on-farm activities*), selanjutnya pengadaan sarana produksi, agroindustri pengolahan, pemasaran, dan jasa-jasa penunjang: kelompok kegiatan luar usahatani (*off-farm activities*).

Dalam era pembangunan yang moderen ini kegiatan agribisnis dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan yang nyata bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk:

1. Hasil produksi pertanian (swasembada beras, 1984)
2. Pasar (pangsa pasar domestik di pedesaan bagi produk industri)
3. Faktor produksi (penyediaan tenaga kerja, modal, dan bahan baku sektor industri)
4. Kesempatan kerja (daya serap tenaga kerja agribisnis urutan terbesar).

Kegiatan agroindustri dapat mencakup: industri peralatan dan mesin pertanian, Industri pengolahan hasil pertanian (pangan, non pangan, perhutanan), dan Industri jasa sektor pertanian.

Pengembangan Kota Pantai Sebagai *Water Front City*

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81.791 km mempunyai keragaman tinggi dalam ekosistem dan bentukan fisik. Kawasan pantai: memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan beragam, fungsi penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, penyedia jasa-jasa kenyamanan, dan memiliki aksesibilitas untuk berbagai kegiatan (transportasi, pemukiman, pariwisata, dll). Pembangunan atau aktivitas manusia dalam memanfaatkan potensi pantai dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran, over-eksploitasi SDA, degradasi fisik, penurunan nilai estetika, dan sebagainya. Ekosistem pantai menjadi kritis, apalagi jika dikaitkan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan fasilitas menimbulkan berbagai perubahan lingkungan. Pembangunan perumahan dengan reklamasi pantai menimbulkan permasalahan. Secara umum, itulah gambaran kota-kota pantai di Indonesia saat ini.

Kota Cirebon merupakan kota pelabuhan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan merupakan pintu keluar masuk untuk ekspor dan impor. Dari data BPS kota Cirebon dalam Angka (2009), diketahui total wilayah kota seluas 3.736 ha dengan garis pantai sepanjang sekitar 8 km. Sebagai masyarakat maritim, adakah "merit" terhadap kebanggaan akan laut? Mulai dari pantai dan ombaknya yang sebenarnya beralun di setiap helaan dan hembusan nafas kita, angin lautnya yang dapat melambaikan tajuk pepohonan, hasil ikannya yang dapat membuat keluarga nelayan tersenyum ceria, keindahan pantainya dapat membuat ceria penduduknya untuk berekreasi dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Di mana kita bisa merasakan ungkapan di atas di sepanjang 8 km bibir pantai kota Cirebon?

Sadar atau tidak sadar, 8 km panjang pantai, dengan jumlah penduduk kota Cirebon sekitar 300.000 maka selayaknya dapat

memanfaatkan sumberdaya lingkungan pantai tersebut untuk segala penggunaan yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kota dengan menjadikan kota Cirebon adalah kota yang menghadapkan wajahnya ke pantai sebagai "water front city". Bukan sebaliknya, sebagai kenyataan saat ini, yaitu membelakangi pantai, sebagai "water back city" (Gambar 15). Keduanya memiliki filosofi yang sangat berbeda dan kontras. Bagi kota yang membelakangi pantai, umumnya lebih menghargai dengan menghadapkan wajahnya ke daratan (pada umumnya ke akses jalan raya). Hal tersebut tidak pernah terkait dengan wilayah perairan, sehingga apakah itu pantai laut, pantai sungai maupun danau hanya dijadikan hal yang tidak penting, untuk membuang limbah, kotoran, sampah dan jadilah lingkungan kota yang kotor, bisa jadi sebagai wilayah endapan sedimentasi yang tidak terkontrol, atau bahkan lebih jauh wilayah yang dihantam abrasi karena hilangnya penahan pantai seperti rusaknya hutan bakau dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mengakibatkan intrusi air laut ke dalam daratan.

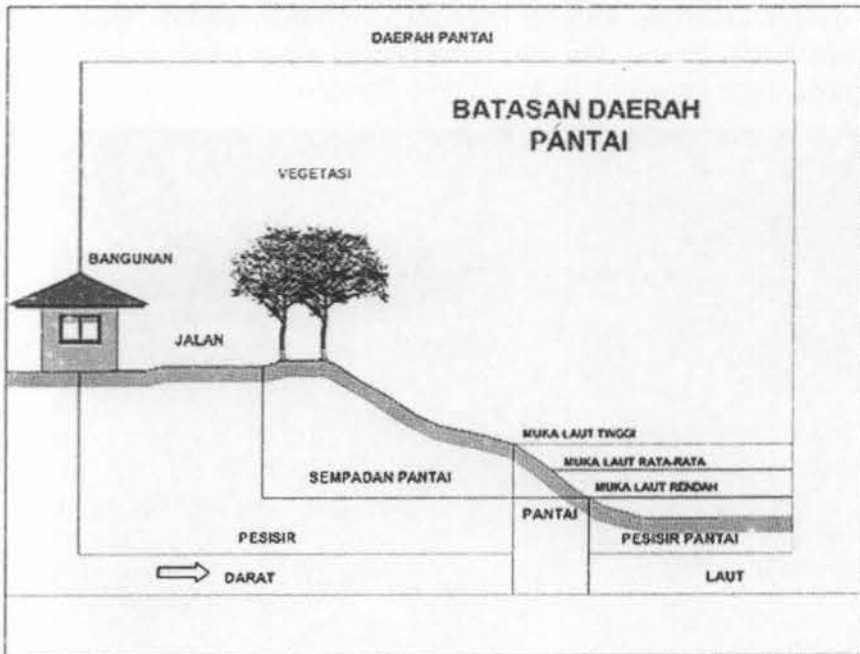


(Sumber: Google Earth, Maret 2010)

Gambar 15. Kota Cirebon yang relatif padat hingga sampai kawasan pantai dan sebagian besar infrastruktur kota membelakangi pantai

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pendesainan, implementasi, monitoring dan evaluasi

dari aspek tata kota, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Visi pemerintahan Kota Cirebon seharusnya didukung oleh pengembangan dan pengelolaan kawasan pantai yang terencana dengan baik agar tercipta harmonisasi kepentingan pembangunan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) yang memperhatikan karakteristik dan keunikan kawasan pantai kota Cirebon. *Water front city*, konsep ini harus diberdayakan kembali sebagaimana nenek moyang kita saat mendarat di pantai, maka semua kegiatan dihadapkan ke badan air. Dengan demikian wajah badan air setiap saat dapat dilihat dan dijaga kelestariannya mulai dari kebersihan dan keindahan lingkungannya, pemanfaatannya, serta kehidupan sosial budayanya. Secara kelembagaan, peraturan tata ruang pantai (Gambar 16) perlu ditegakkan secara konsisten berdasarkan komitmen pemerintah dan masyarakat kota Cirebon.



Gambar 16. Batasan Daerah Pantai (dimodifikasi dari Dahuri, 1998)

Untuk mewujudkan Cirebon sebagai "*water front city*" perlu dicanangkan dalam visi kota Cirebon. Untuk merevitalisasi biofisik, ekonomi dan sosial budaya menuju ke *water front city* yang berkelanjutan, maka diperlukan data permasalahan dan potensi yang ada sebelum menetapkan tujuannya (Gambar 17).



Gambar 17. Kerangka pikir menuju Cirebon Water Front City yang berkelanjutan.

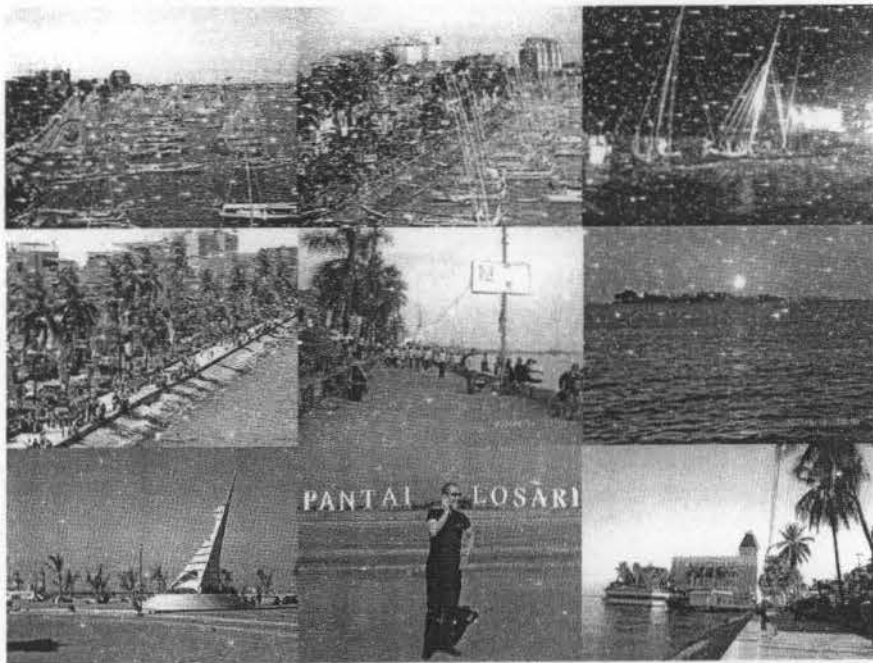
Selanjutnya misi diterjemahkan sebagai metoda pencapaiannya menuju ke *water front city* (Nurfaida, Arifin, dan Munandar, 2008). Komitmen yang tinggi antara pemerintah dan segenap *stakeholders* termasuk masyarakat kota Cirebon sangat diperlukan.

Komparasi Kasus "Water Front City" di Kota Lain

Dalam makalah ini disajikan kasus-kasus kota di Indonesia yaitu Makassar, Pontianak, Tanjung Pinang dan kota International yaitu Bangkok dan Singapore yang telah memiliki konsep sebagai *water front city*. Diharapkan kasus ini dapat menjadi perbandingan dan dapat pula sebagai *Bench Mark* bagi kota Cirebon jika akan menuju ke *sustainable water front city*.

Makassar Water Front City

Kota Makassar dengan panjang pantai 36,1 km memiliki potensi yang tinggi baik di darat maupun ke arah laut. Pantai Losari yang menghadap ke barat telah dijadikan sebagai *landmark* kota Makassar dengan pemandangan sunset yang indah di setiap sore hari. Sebagai kota pantai Makassar memiliki potensi unggulan yaitu Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bayang, dermaga kapal penyeberangan, Benteng Ujung Pandang, hutan mangrove, kekayaan perikanan, tambak, dan terumbu karang. Makassar juga telah melakukan reklamasi Pantai Losari untuk dijadikan tiga anjungan yang berfungsi sebagai taman umum (*public park*) dimana seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya untuk segala aktivitas selama 24 jam (Gambar 18).



Gambar 18. Pengembangan Pantai Losari Makassar setelah konsolidasi lahan di mana sempadan pantai dibebaskan dari pedagang kaki lima yang telah ditempatkan pada area lain. Sebagai ruang publik, area ini hidup selama 24 jam/hari untuk berbagai aktivitas penduduk kota: Sandek Festival (atas), masyarakat menikmati *water front* menjelang matahari tenggelam (tengah), anjungan-anjungan di pantai losari berupa plaza untuk kegiatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat kota (bawah).

Pada tahun sembilan puluhan pantai Losari terkenal kumuh karena dipenuhi pedagang kaki lima yang tidak beraturan dan kotor. Setelah dilakukan konsolidasi lahan penggunaan pantai dengan cara memindahkan lokasi pedagang kaki lima, kemudian membebaskan pantai Losari dari berbagai bangunan pada sempadan tertentu. Setelah itu berbagai aktivitas publik dilakukan di Pantai Losari mulai sebagai tempat jalan-jalan, tempat berolah raga, tempat rekreasi umum, atraksi kesenian, bazaar insidental, *event-event* festival pada perayaan bahari maupun perayaan nasional dan lain sebagainya.

Sebagai *water front city*, Makassar juga telah melakukan reklamasi Pantai Tanjung Bunga untuk pengembangan kota jasa dan perdagangan (Gambar 19). Konsep reklamasi yang dilakukan yang seharusnya memperbaiki kondisi lahan pantai, ternyata lebih banyak diartikan dengan mengurug kawasan perairan rawa mangrove yang penuh dengan formasi hutan bakau, pedada, dan kiapi menjadi lahan darat baru. Berdasarkan pengamatan, telah terjadi degradasi hutan mangrove akibat kegiatan ini. Hal ini seharusnya bisa dicegah dengan baik, apabila pemerintah dan berbagai *stakeholders* memiliki konsep yang sama terhadap arti reklamasi pantai.



Gambar 19. Tanjung Bunga di Kota Makassar sebagai hasil reklamasi pantai yang mengurug kawasan mangrove menjadi pusat perdagangan, jasa dan permukiman, termasuk resettlement permukiman nelayan ke rumah susun (atas), dan konsep *water front* di mana bangunan-bangunan utama dibuat menghadap ke pantai (bawah)

Pontianak Water Front City

Pontianak dikenal sebagai kota seribu parit. Dengan keberadaan Sungai Kapuas yang membelah Kota Pontianak sebenarnya sejak jaman dulu telah memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi, sehingga jika kita menyusuri sungai hingga ke pedalaman, maka lapisan pertama dari perkampungan tepi sungai apakah suku Bugis, Melayu, ataupun Dayak semuanya menghadap ke badan air sungai, akan tetapi masyarakat moderen telah beralih ke akses darat, dan konsep *water front* secara tidak sadar telah ditinggalkannya. Hal ini sangat disayangkan, karena telah mengakibatkan badan air menjadi tidak diperhatikan, kotor, kumuh dan lingkungannya rusak, dan akhirnya parit-parit pun tidak terurus, dan Pontianak menjadi langganan banjir setiap tahun. Tentu hal demikian tidak perlu dicontoh.

Dalam perbandingan di sini penulis ingin melihat satu sudut kota Pontianak yang secara sadar menjadikannya sebagai obyek "*water front*", yaitu alun-alun yang berada di depan gedung POLDA Kalbar, di tepi Sungai Kapuas (Gambar 20). Lanskap ini sebagai area publik memiliki manfaat yang maksimal dengan konsep yang bagus. akan tetapi budaya dan kebiasaan/perilaku masyarakat kotanya sudah kepalang kurang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini perlu ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, serta diseminasi program yang menuju pada keberlanjutan lingkungan, kebersihan dan kepedulian terhadap aspek keindahan dan kenyamanan perlu selalu digalang melalui himbauan dan penyuluhan.



Gambar 20. Alun-alun di Kota Pontianak satu contoh obyek dan infrastruktur publik yang direncanakan dan dirancang menghadap ke perairan Sungai Kapuas

Tanjung Pinang *Water Front City*

Sebagai kota pulau, Tanjung Pinang yang penuh dengan peninggalan sejarah mencoba menata kotanya sebagai *water front city* secara terencana dengan baik. Infrastruktur kota termasuk kantor Balai kota ditempatkan menghadap ke pantai. Sebagian besar segmen jalan memiliki sudut pandang yang terbuka ke arah perairan pantai, bahkan memberdayakan kembali dengan penanaman pohon tanjung dan pohon pinang secara bergantian yang menghiasi sempadan pantai sebagai *landmark* Kota Tanjung Pinang (Gambar 21).



Gambar 21. Kunjungan ke kantor Walikota, maket pengembangan *water front city*, infrastruktur kota yang menghadap pantai, dan *landmark* Kota Tanjung Pinang yang dicirikan pohon tanjung dan pinang.

Bangkok *Water Front City*

Kota Bangkok dibelah oleh sungai besar Chao Phraya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, bahwa pada awal tahun 2000 sungai ini masih terlihat banyak eceng gondok di atas perairannya, tetapi setelah Raja Bhumibol Adulyadej mencanangkan serupa program kali bersih, diiringi gerakan yang riil, dan me-

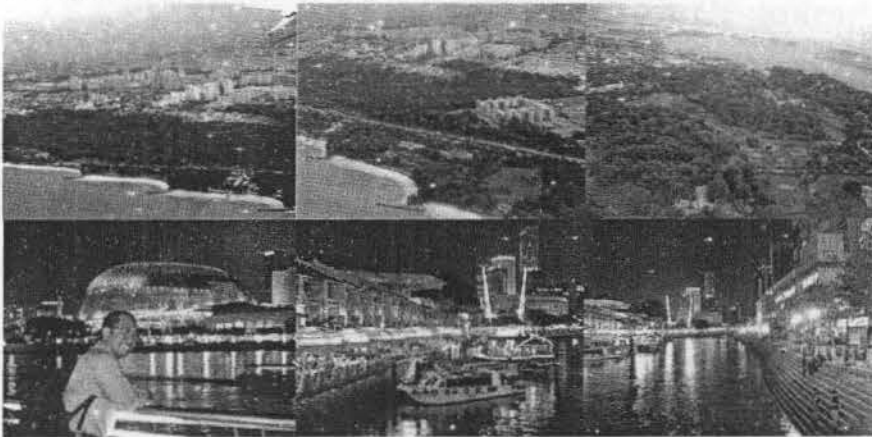


Gambar 22. Pemandangan *water front* di salah satu pantai di Rayong Province Thailand (kiri), teras restoran yang menghadap ke perairan Sungai Chao Phraya (tengah), dan petang hari mengikuti perjalanan wisata sambil makan malam di atas kapal yang menyusuri obyek-obyek menarik di sepanjang sungai di Kota Bangkok (kanan).

mang sebagian obyek pagoda, hotel, bagian dari gedung-gedung utama telah menghadap ke perairan sungai sehingga terlihat bahwa badan sungai sebagai obyek yang serupa serambi. Bahkan kegiatan wisata yang memanfaatkan obyek perairan digalakkan, seperti river cruise yang menyusuri kota di sepanjang sungai (Gambar 22).

Singapore Water Front City

Sebagai negara pulau, atau disebut juga Negara kota, maka Singapore yang dikelilingan perairan laut sempurnalah ia menjadi *water front city* yang patut dicontoh. Sebagai Negara maju di Asia Tenggara, Singapore merupakan wilayah yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari wilayah Jakarta, akan tetapi memiliki perencanaan kota yang sangat baik dengan tingkat kepatuhan warganya terhadap aturan sangat tinggi. Sebagai *water front city*, Singapore menghadapkan obyek-obyek landmark nya menghadap ke perairan pantai, akan tetapi penghitungan sempadan pantai dan perlindungan pantai pada area tertentu sangat diperhatikan dengan penanaman pepohonan penahan gelombang dan menjadikannya sebagai buffer antara/peralihan ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Konsep penghijauannya sangat baik yang dapat dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami (Gambar 23).

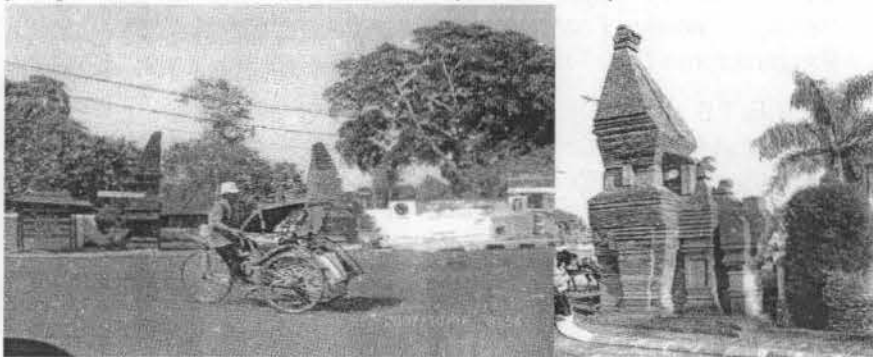


Gambar 23. Singapore *water front city* dengan hutan tanaman sebagai zona penyangga untuk pengamanan pantai serta kota dari bahaya gelombang selain untuk mencegah abrasi serta intrusi air laut (atas), dan pada bagian tertentu obyek wisata, restaurant dan hotel yang menghadap ke perairan sungai dan penempatan berbagai infrastruktur dan landmark kota yang berada dan menghadap ke pantai (bawah).

Penutup – Revitalisasi Karakteristik Kota Cirebon

Pengembangan kota Cirebon ke depan tidak hanya bersifat normatif, hanya sebatas konsep disampaikan dalam seminar, tertuang dalam bentuk laporan dan prosiding, tetapi perlu diimplementasikan di lapang. Pembangunannya perlu dikawal terus-menerus oleh semua pihak sampai tujuannya tercapai, yaitu pembangunan kota Cirebon yang berkelanjutan tercapai berbasiskan pada keseimbangan ekologi (lingkungan bio-fisik), ekonomi dan sosial-bidaya.

Sebagai kota pantai, tidak ada salahnya kota Cirebon mencontoh kota-kota lain di Indonesia maupun di luar negeri yang telah berhasil mengembangkan *water front city*. Perlu dievaluasi kembali tata ruang kota terutama tata guna lahan pada kawasan pantai. Hal yang penting adalah menetapkan lebar sempadan pantai, membuka akses masyarakat untuk memanfaatkan pantai semaksimal mungkin, melakukan konsolidasi lahan jika kawasan pantai terdegradasi akibat kekumuhan dan kerusakan lingkungan saat ini, serta melakukan penghijauan pada kawasan pantai yang rawan terhadap gerusan gelombang. Secara umum kota Cirebon perlu mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota, antara lain menyatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) kota minimal 30%. Lebih jauh, sesuatu yang *distinct*, yang khas dari Kota Cirebon apakah itu bentuk arsitektur Candi Bentar sebagai gapura perlu dijadikan *landmark* kota, sehingga siapa pun yang melihat arsitektur candi bentar dari batu bata merah, maka citra yang muncul adalah kota Cirebon (Gambar 24).



Gambar 24. Bangunan Candi Bentar sebagai arsitektur peninggalan peralihan Hindu - Islam yang dapat dijadikan landmark pintu gerbang (gapura) pada setiap infrastruktur dan bangunan umum.

Hal ini perlu diatur melalui SK Walikota atau Perda yang mewajibkan semua infrastruktur bangunan umum, seperti terminal, stasiun, perkantoran, termasuk hotel, area perumahan real estate menggunakan arsitektur gerbangnya dengan bangunan Candi Bentar.

Referensi

- Arifin, H.S. 2006. Hubungan Tata Ruang Wilayah Dan Daya Dukung Pertanian di Cirebon pada Era Modernisasi. Seminar Pertanian Plus Ikatan Kekeluargaan Cirebon IPB "Prospek Pertanian Cirebon di Era Modernisasi", Sabtu 28 Januari 2006, Hotel Prima, Jl. Siliwangi – Cirebon. 8 hal.
- Dahuri R. 1998. Kebutuhan Riset untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan secara Terpadu. *Jurnal Pesisir dan Lautan* 1:53-65.
- Indrawati, S.M. 2005. Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, editor: Soegijoko, B.T.S, G.C. Napitupulu dan W. Mulyana. *Urban and Regional Development Institute*, Jakarta. 478hal.
- Nurfaida, H.S. Arifin, dan A. Munandar. 2008. Pengembangan dan Rencana Pengelolaan Lanskap Pantai Kota Makassar Sebagai *Water Front City*. Makalah Seminar Sekolah Pascasarjana IPB. Tidak dipublikasikan.
- Soegijoko, B.T.S. 2002. Pergeseran dalam Konsepsi dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota di Indonesia. *Urban and Regional Development Institute*, Jakarta. 29hal.

SEKILAS TENTANG IKATAN KEKELUARGAAN CIREBON – INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IKC-IPB)

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai universitas pertanian terbaik di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul, tidak terkecuali bagi mereka yang berasal dari Cirebon. IPB merupakan institusi dengan staf dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Sebagai daerah yang memiliki ciri khas, para mahasiswa dan staf yang berasal dari kota dan kabupaten Cirebon berusaha untuk menghimpun diri dalam wadah Ikatan Keluarga Cirebon – Institut Pertanian Bogor (IKC-IPB). Setiap tahun tidak kurang dari 40 mahasiswa baru asal Cirebon masuk IPB. Staf pengajar IPB yang berasal dari Cirebon saat ini berjumlah ± 25 orang dengan berbagai keahlian yang dimilikinya. Banyak di antara mereka telah menjadi guru besar dan menduduki posisi penting di IPB.

Sebagai wadah mahasiswa daerah Cirebon, IKC-IPB mempunyai visi dan misi dalam pengabdian ke daerah asal (Cirebon) sesuai dengan kompetensi utama di bidang pertanian secara luas. IKC-IPB memiliki motto "Wong Cirebon Bli Klalen ning Sedulur lan Daerahe". Setiap tahun tidak kurang dari 30 program kerja dilaksanakan oleh kepemimpinan IKC-IPB. Program kerja IKC-IPB diarahkan kepada (1) penguatan organisasi melalui kegiatan yang bersifat kekeluargaan, (2) peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, dan diskusi kelompok, serta (3) pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, workshop, dan aksi nyata. Beberapa program kerja IKC-IPB yang telah dan sedang dilaksanakan terkait dengan pengabdian di Cirebon adalah Seminar Pertanian (2006), Penyuluhan Keamanan Pangan (2009), Workshop dan Aksi Penanaman Pohon (2010), dan Try Out Ujian Masuk Perguruan Tinggi (2005-sekarang).

IKC-IPB di dalam menjalankan program kerjanya perlu dukungan dan kerjasama dari instansi terkait, terutama pemerintah daerah. IKC-IPB berusaha dengan optimal untuk bersama-sama membangun Cirebon menjadi daerah yang maju, makmur, bermartabat, dan berkeadilan. Demi mewujudkan cita-cita luhur dari para pendiri Cirebon tersebut, diperlukan upaya bersama di dalam membangun Cirebon yang lebih baik. Peran IKC-IPB akan sangat signifikan jika didukung oleh semua pihak.

Website : ikc.ipb.ac.id
Email : ikc.ipb.bogor@gmail.com



Kampus IPB Taman Kencana
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16151
Telp. 0251-8355-158 E-mail: ipbpress@ipb.ac.id

Presiding

ISBN : 978-979-493-271-1



9 789794 932711